

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Partai Politik Terhadap Kemenangan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2015

Untuk mengetahui pengaruh partai politik dalam pemilihan kepala daerah pada daerah tertentu, selain pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan fungsi partai politik, maka yang tidak kalah penting untuk diketahui dan dipahami ialah mengenai tingkat pendidikan, ekonomi, dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab I, bahwa masyarakat Madura pada umumnya di gadang-gadang sebagai masyarakat yang patuh terhadap tokoh Masyarakat, khususnya tokoh Agama/ Kyai. Dimana tokoh masyarakat merupakan sosok yang sentral dalam kehidupan masyarakat Madura. Sehingga hal ini akan mempengaruhi aktivitas sosial politik masyarakat Madura.

Untuk mengetahui pengaruh partai politik terhadap kemenangan calon kepala daerah yang diusungnya pada pilkada Sumenep di tahun 2015, maka perlu diketahui sejauh mana dominasi pengaruh tokoh/ figuritas dalam mempengaruhi masyarakat, seiring dengan semakin mempunyainya pendidikan masyarakat Madura.

1. Pandangan Partai Politik Terhadap Pengaruh Figuritas Dalam Rekrutmen Pemilih

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa salah satu tujuan partai politik ialah “meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan”. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan di atas, secara teori partai politik memiliki fungsi antara lain ialah fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, rekrutmen pemilih, dan pendidikan politik. Akan tetapi disini penulis hanya akan membahas fungsi partai politik yang erat kaitannya dengan pengaruh partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses pengisian jabatan politik, sehingga akan memudahkan penulis dalam mengkaji pengaruh partai politik terhadap kemenangan calon kepala daerah dalam pilkada kabupaten Sumenep tahun 2015.

Untuk mengetahui pandangan partai politik terhadap pengaruh figuritas dalam rekrutmen pemilih, perlu diketahui apakah figuritas hanya diposisikan sebagai sasaran dalam pelaksanaan fungsi dari partai politik, atau justru difungsikan sebagai sarana dalam melaksanakan fungsi-fungsi partai politik itu sendiri oleh partai politik di tingkat DPC Kabupaten Sumenep, selaku partai politik pengusung pasangan calon pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sumenep.

a. Partai Amanat Nasional (PAN)

1) Komunikasi politik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Badrus Syamsi (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN)) kabupaten Sumenep, partai PAN telah melaksanakan fungsi komunikasi politik. Dimana pelaksanaan fungsi komunikasi politik tersebut dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimilikinya. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Dalam rangka menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Partai Amanat Nasional menggunakan media seperti Reses. Dimana setiap anggota legeslatif Partai Amanat Nasional di parlemen melakukan reses setiap tiga bulan sekali. Reses merupakan media yang mempertemukan masyarakat dengan wakilnya di parlemen, sehingga dalam acara reses inilah kemudian kepentingan-kepentingan masyarakat itu disampaikan dan di himpun oleh masing-masing legeslatif, yang kemudian disampaikan kepada instansi yang terkait.”¹

Dalam petikan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa partai PAN melaksanakan fungsi komunikasi politik dilaksanakan yaitu setiap tiga bulan sekali.

¹Badrus Syamsi, Ketua DPC Partai PAN, dalam wawancara tentang upaya partai politik dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan politik pemilih pada Pilkada Sumenep tahun 2015 di kantor cabang PAN Sumenep, pada 17 Maret 2017, pukul 13.35 WIB. Ijin mengutip telah diberikan

Dengan demikian sudah jelas bahwa dalam melakukan fungsi komunikasi politik, partai PAN tidak menggerakkan mesin partai yang dimiliki secara maksimal. Sehingga pelaksanaan dari pada fungsi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai PAN tidak akan efektif. Diketahui bahwa masa reses merupakan tugas yang melekat pada setiap anggota DPRD dengan kapasitas sebagai wakil rakyat, bukan sebagai mesin partai secara utuh. Sehingga pelaksanaan dari pada fungsi komunikasi politik dengan hanya mengandalkan masa reses anggota DPRD, maka tidak akan dapat menjangkau aspirasi masyarakat secara luas.

2) Sosialisasi dan pendidikan politik

Sedangkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan gagasan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, partai PAN melakukan sosialisasi politik dengan menawarkan program-program yang dimiliki partai. Dimana program dan gagasan yang menjadi materi dari pada sosialisasi politik ialah yang berkenaan dengan perjuangan partai untuk kepentingan masyarakat. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Partai Amanat Nasional seringkali melakukan advokasi masyarakat bahwa Partai Amanat Nasional merupakan partai politik yang berjuang untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini Partai Amanat Nasional memberikan advokasi publik dan

memberikan rogram-program yang bersifat padat karya, dan program pemberdayaan eknomi masyarakat. Selain itu, Partai Amanat Nasional juga menggunakan strategi kemitraan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu.”²

Dari petikan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partai PAN mengenalkan program-program yang dimilikinya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain melakukan sosialisasi politik guna memasyarakatkan gagasan-gagasan dan visi misinya, partai PAN juga melakukan pendidikan politik guna mendorong kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dari petikan hasil wawancara berikut:

“Dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, Partai Amanat Nasional selalu melakukan saresahan-saresahan politik, baik di internal partai, maupun di masyarakat pada umumnya. Yang demikian dilakukan agar masyarakat melihat partai politik sebagai mitra dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Sehingga terbangun kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Karena menurut Partai Amanat Nasional, saat ini kepercayaan masyarakat kepada Partai politik telah hilang.”³

Dari petikan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa sebagai partai politik, partai PAN tidak memungkiri akan pudarnya kepercayaan masyarkat terhadap partai politik.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Dengan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan, partai PAN bermaksud untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, khususnya partai politik PAN itu sendiri. Disisi lain, materi sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh partai PAN kepada masyarakat sudah bagus, dan tinggal bagaimana partai PAN melaksanakan program yang ditawarkan dalam proses sosialisasi politik tersebut.

3) Rekrutmen pemilih

Dalam usaha memenangkan pasangan calon yang di usung pada pilkada di kabupaten Sumenep tahun 2015, yang dilakukan oleh partai PAN ialah menjual kemampuan yang dimiliki oleh figur tersebut. Berikut petikan hasil wawancaranya, “dalam rangka memenangkan pasangan cabub yang diusung, maka yang dilakukan Partai Amanat Nasional ialah menjual kapabilitas Figur, yaitu dengan memaparkan program-program dan langkah-langkah yang akan di tempuh oleh pasangan cabup guna kemajuan Sumenep.”⁴

Dari petikan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa dalam rangka menggalang dukungan dari pemilih, partai PAN menjual kapabilitas dari seorang figur. Dalam hal ini, secara

⁴*Ibid.*

jelas dapat di pandang sebagai bentuk pengakuan partai PAN akan kuatnya pengaruh figur dalam proses rekrutmen pemilih. Sehingga, dengan adanya kesadaran tersebut kemudian partai PAN dapat melakukan langkah-langkah yang strategis guna mendapat dukungan dari masyarakat.

b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1) Komunikasi politik

Dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Ust. Rimbun (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)) kabupaten Sumenep, beliau menuturkan bahwa dalam melakukan serap aspirasi “Partai Keadilan Sejahtera membuka rumah aspirasi di setiap kantor-kantor yang dimilikinya sebagai layanan untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Layanan aspirasi ini tidak hanya di buka di tingkat kabupaten, melainkan sampai tingkat desa, bahkan sampai di rumah-rumah kader juga di buka.”⁵ Dengan demikian partai PKS telah melaksanakan fungsi komunikasi politik dengan baik, dan tentu pelaksanaannya akan lebih merata.

⁵Rimbun, Ketua DPC Partai PKS, dalam wawancara tentang upaya partai politik dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan politik pemilih pada Pilkada Sumenep tahun 2015 di kediaman Ust. Rimbun Sumenep, pada 16 Maret 2017, pukul 14. 15 WIB. Ijin mengutip telah diberikan

2) Sosialisasi dan pendidikan politik

Sebagai upaya dalam menanam atau memasyarakatkan gagasan-gagasan politik yang hendak dicapai, partai PKS mengadakan suatu forum sebagai wadah sosialisasi dan pendidikan politik. Yang mana forum ini tidak hanya diadakan di tingkat kabupaten, melainkan sampai pada tingkat desa, dan forum ini juga tidak semata-mata untuk kader partai saja, melainkan untuk masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari petikan hasil wawancara berikut:

“Semua tingkatan struktur dikunjungi dan melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi itu juga pengurus di minta untuk melakukan sosialisasi sampai tingkat desa. Dan juga melibatkan anggota legeslatif dalam melaksanakan sosialisasi. Sedangkan pendidikan politik diberikan dalam suatu forum, baik forum yang diadakan di kecamatan ataupun di desa. Kemudian dalam forum tersebut dilakukan sosialisasi politik termasuk mensosialisasikan pasangan cabub yang diusung, sekaligus meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pilkada. Menurut pandangan Partai Keadilan Sejahtera, proses pilkada merupakan even yang menjadi perhatian. Hal ini karena memilih pemimpin adalah suatu kewajiban, apa lagi dalam sebuah wilayah atau sebuah daerah. Oleh karena itu pendidikan politik yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera juga meliputi bagaimana masyarakat memilih pemimpin yang tepat yang sesuai aspirasi masyarakat. Selain itu masyarakat diminta untuk tidak terlibat money politik.”⁶

⁶*Ibid.*

Dari petikan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat, partai PKS melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara masif, yaitu dengan menggerakkan semua mesin partai yang ada. Karena sosialisasi dan pendidikan politik tidak hanya dilakukan terhadap kader partai, akan tetapi dilakukan terhadap berbagai kalangan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa. Dengan luasnya jangkauan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan,, tentu partai PKS akan dapat mempengaruhi masyarakat kabupaten Sumenep dengan lebih banyak.

3) Rekrutmen pemilih

Dalam rangka mencari dukungan masyarakat guna memenangkan pasangan cabup yang diusung, dimana partai PKS memaksimalkan mesin partai yang ada. Partai PKS terlebih dahulu membangun soliditas di antara kader partai, kemudian setelah dilakukan sosialisasi, kader inti partai PKS diminta menyebar untuk melakukan rekrutmen pemilih. Sebagaimana petikan hasil wawancara berikut, bahwa “untuk memenangkan pasangan Cabup yang diusung, Partai Keadilan Sejahtera melakukan pembinaan dan memperkuat soliditas para kader dan para simpatisan. Kemudian melakukan sosialisasi kepada seluruh kader. Dimana anggota inti Partai Keadilan Sejahtera

diminta untuk bergerak dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk memenangkan pilkada tersebut.”⁷

c. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1) Komunikasi politik

Berdasarkan petikan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Rusmaidi (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)) kabupaten Sumenep, dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik, partai PKB diwakili oleh anggota DPRD yang dimilikinya, yaitu pada saat masa reses. Berikut petikan hasil wawancaranya, “Partai Persatuan Pembangunan menyerap dan menyalurkan semua aspirasi elemen masyarakat, yaitu dilakukan oleh anggota legeslatif yang dimiliki, dengan melalui reses yang melekat kepada masing-masing anggota legesla”⁸

Dari petikan hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa apa yang dilakukan oleh partai PKB tidak brbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh partai PAN dalam melakukan fungsi komunikasi politik.

⁷*Ibid.*

⁸Rusmaidi, Sekretaris DPC Partai PKB, dalam wawancara tentang upaya partai politik dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan politik pemilih pada Pilkada Sumenep tahun 2015 di kantor cabang PKB Sumenep, pada 15 Maret 2017, pukul 13.15 WIB. Ijin mengutip telah diberikan

Dimana dalam pelaksanaan fungsi ini, partai PKB tidak menggerakkan mesin partai secara maksimal, yaitu hanya mengandalkan masa reses yang melekat pada setiap anggota DPRD yang dimiliki. Dengan demikian hasil komunikasi politik ini tidak akan efektif, karena hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa reses merupakan suatu tugas yang melekat pada DPRD dengan kapasitas sebagai wakil rakyat, tidak sebagai mesin partai secara utuh. Di sisi lain, reses yang dilakukan oleh anggota DPRD akan hanya terfokus pada konstituen atau simpatisan yang pada saat itu memenangkan dirinya dalam pemilihan legeslatif, tentu hal itu tidak dapat menjangkau aspirasi masyarakat luas.

2) Sosialisasi dan pendidikan politik

Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat dalam pemilihan, partai PKB juga melakukan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap kader dan masyarakat sepabagai pemilih. yang demikian itu dapat di lihat dari petikan hasil wawancara yang dilakukan penulis berikut:

“Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaiman masyarakat disadarkan bahwa

politik itu penting dalam rangka mengisi ruang-ruang yang ada di pemerintahan, maupun pembangunan yang ada di kabupaten Sumenep. Selain itu pendidikan politik juga diberikan terhadap kader-kader partai melalui kaderisasi. Pendidikan politik ini dilakukan dengan mendatangkan seluruh pengurus atau kader untuk mengikuti pendidikan politik, baik yang dilakukan di kabupaten atau pun di kecamatan.”⁹

Dari petikan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa selain sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, partai PKB berupaya untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam proses pengisian jabatan politik.

Dimana partai PKB melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara masif di tengah masyarakat, yaitu dengan melakukan pendidikan politik, baik di kabupaten, maupun di kecamatan. Hal itu menunjukkan keseriusan partai dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan dukungan masyarakat, serta untuk membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya.

3) Rekrutmen pemilih

Dalam melakukan rekrutmen pemilih, partai PKB tidak hanya terfokus pada mesin partai yang dimiliki, akan tetapi juga melakukan kerjasama dengan figur. Hal itu dilakukan, karena

⁹*Ibid.*

menurut partai PKB, figur yang diusung memiliki tim sukses dan tim relawan dalam rangka memenangkan pilkada. Hal tersebut dapat dilihat dari petikan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti berikut, bahwa “untuk memenangkan pasangan cabub yang diusung, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan kerjasama dengan calon, karena calon memiliki tim khusus pemenangan yang bisa kerjasama dengan partai. Jadi Partai Kebangkitan Bangsa merapatkan barisan semua struktur yang ada, dan juga tim relawan yang di bentuk oleh calon untuk pemenangan.”¹⁰ Disini secara tegas partai PKB mengakui bahwa figur memiliki pengaruh yang cukup besar dalam usaha memenangkan pemilihan. Sehingga dengan cara melakukan kerjasama seperti ini tentu upaya yang dilakukan partai PKB untuk meningkatkan dukungan masyarakat akan efektif.

d. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1) Komunikasi politik

Mengenai pelaksanaan fungsi komunikasi politik, Partai Persatuan Pembangunan melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan partai PAN dan juga partai PKB.

¹⁰*Ibid.*

Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak M. Syukri (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP)) kabupaten Sumenep.

“Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat, baik yang ada di kabupaten/kota atau pun di kepulauan, maka Partai Kebangkitan Bangsa melakukan serap aspirasi masyarakat melalui reses yang melekat pada masing-masing anggota legeslatif yang dimilikinya. Dengan reses yang melekat pada masing-masing anggota legeslatif inilah Partai Kebangkitan Bangsa turun langsung kelapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat.”¹¹

Sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa reses merupakan tugas yang melekat pada masing-masing anggota DPRD yang itu dilakukan pada setiap tiga bulan sekali. Selain itu, anggota DPRD dalam melakukan reses, hanya akan terfokus pada konstituen dan simpatisan yang telah mememanangkannya dalam pemilihan legeslatif. Sehingga tentu pelaksanaan komunikasi politik yang hanya mengandalkan masa reses yang melekat

2) Sosialisasi dan pendidikan politik

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik serta mendapat dukungan dari masyarakat. Maka Partai Persatuan

¹¹M. Syukri, Sekretaris DPC Partai PPP, dalam wawancara tentang upaya partai politik dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan politik pemilih pada Pilkada Sumenep tahun 2015 di kantor cabang PPP Sumenep, pada 16 Maret 2017, pukul 12.50 WIB. Ijin mengutip telah diberikan

Pembangunan melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan cara menggandeng tokoh-tokoh yang memiliki basis massa di masyarakat. Selain itu, partai PPP juga menggerakkan seluruh mesin partai. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis berikut:

“Sebelum melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat, Partai Persatuan Pembangunan terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi pengurus, yaitu di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Selain itu, sebagai partai politik yang berbasis islam Partai Persatuan Pembangunan juga melakukan pendekatan tokoh, pendekatan santri dan pendekatan Kyai, dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki basis massa. Disamping itu Partai Persatuan Pembangunan juga melakukan pendekatan terhadap perempuan. Jadi pendekatan tersebut semua dilakukan dengan baik baru kemudian melakukan sosialisasi untuk memenangkan Pilkada.”¹²

Dari petikan hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa partai PPP melakukan sosialisasi politik dengan terlebih dahulu memahami kehidupan sosial politik yang berkembang di Kabupaten Sumenep. Hal ini terlihat dari bagaimana upaya yang dilakukan partai PPP dalam melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang demikian pasti akan mendapatkan dukungan yang begitu besar dari masyarakat. Apabila pendekatan-pendekatan figuritas tersebut berhasil dilakukan oleh partai PPP.

¹²*Ibid.*

Selain itu, partai PPP juga melakukan pendidikan politik secara masif. sebagaimana petikan hasil wawancara berikut:

“Sebagai partai politik yang berusaha bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, maka Partai Persatuan Pembangunan menggarap kader muda dan pemilih pemula. Yang menjadi garapan Partai Persatuan Pembangunan ialah anak SMA dan juga mahasiswa guna memperkenalkan bahwa asumsi masyarakat tentang politik yang seakan-akan hanya untuk kekuasaan adalah suatu asumsi yang keliru. Dimana Partai Persatuan Pembangunan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa politik itu mencerdaskan. Hal ini karena keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan sebuah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah Partai Peratuan Pembngunan mengambil bagian dalam pendidikan politik, dimana pendidikan dilaksanakan di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Sehingga masyarakat awam tidak lagi tertinggal dalam pengetahuan politik dan dapat mengambil peranan sebagai warga negara yang baik.”¹³

Dari petikan wawancara di atas terlihat jelas bahwa partai PPP ingin menanamkan pengaruhnya secara masif dan juga mencoba memperbaiki citra partai politik di masyarakat, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat Sumenep terhadap partai politik, khususnya partai PPP. Hal ini terlihat jelas dari usaha yang dilakukan oleh partai PPP, yaitu menggarap pemilih pemulah seperti anak usia SMA. Selain itu pendidikan politik yang dilakukan partai PPP tidak hanya terfokus di tingkat kabupaten, melainkan sampai ke pedesaan.

¹³*Ibid.*

3) Rekrutmen pemilih

Sebagai upaya untuk menggalang dukungan yang sebanyak-banyaknya dari pemilih, partai PPP melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh atau figur yang memiliki basis massa, seperti tokoh Agama, ketua ormas dan lain-lain. Sebagaimana petikan hasil wawancara yang penulis lakukan berikut.

“Sebagai partai yang berbasis Islam, selain mensolidkan internal anggota dan pengurus partai, Partai Persatuan Pembangunan melakukan politik santri, dimana selain menghimpun tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki basis massa, dan menghimpun Kyai di pesantren-pesantren yang ada. Kemudian dengan itu mensosialisasikan pasangan cabup yang diusung, dan alasan kenapa mengusung pasangan cabup tersebut, serta menjelaskan visi misi dari pasangan cabup yang diusung.”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas sudah jelas bahwa partai PPP dalam melakukan rekrutmen pemilih tidak hanya terfokus pada mesin partai yang dimiliki, akan tetapi lebih mendayah gunakan figuritas, seperti tokoh Agama dan juga tokoh yang memiliki basis massa. Yang demikian merupakan bentuk kesadaran partai PPP terhadap besarnya pengaruh figuritas dalam proses rekrutmen pemilihan.

¹⁴*Ibid.*

Berdasarkan pembahasan keseluruhan hasil wawancara bersama partai politik di atas, dapat di lihat bahwa partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah pada pilkada kabupaten Sumenep tahun 2015 telah maksimal dalam melaksanakan beberapa fungsinya. Hal ini senada dengan yang disampaikan ibu Dian Novita (Ahli). Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Dillihat dari peraturan perundang-undangan tentang pilkada, tentu partai politik telah maksimal dalam rekrutmen pemilih. Untuk mendaftar saja ditentukan oleh penguasaan kursi di parlemen, sehingga pasangan calon membutuhkan koalisi dari partai pengusung. Dengan ini telah nampak pengaruh partai politik terhadap ritme peroses kampanye dan dalam meraup dukungan terhadap pasangan calon. Selain itu partai politik akan melakukan segala cara selama tidak bertentangan dengan peraturan untuk meraup dukungan dari pada pemilih.”¹⁵

Dalam petikan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa sebagai bukti nyata dari makasimalnya usaha yang dilakukan oleh partai politik dalam rekrutmen pemilih adalah penguasaan kursi di parlemen. Karena menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati/ Waliota Dan Wakil Walikota, yaitu partai politik politik pengusung minimal harus memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau minimal

¹⁵Dian Novita, Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, dalam wawancara tentang pengaruh partai politik terhadap kemenangan pasangan calon pada Pilkada Sumenep tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, pada 18 Maret 2017, pukul 14.15 WIB. Ijin mengutip telah diberikan

memperoleh dukungan suara 25% dari hasil perolehan suara yang sah pada pemilu terakhir. Dengan demikian partai politik harus melakukan koalisi untuk memenuhi ketentuan tersebut, jika hendak mengusung pasangan calon pada pilkada. Sebagaimana yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa pasangan calon kepalah daerah pada pilkada kabupaten Sumenep pada tahun 2015 masing-masing diusung oleh koalisi partai politik.

Akan tetapi, ada hal yang tidak patut untuk dikesampingkan ialah mengenai pelaksanaan fungsi komunikasi politik yang sebagian besar partai politik hanya mengandalkan masa reses yang melekat pada masing-masing anggota DPRD yang dimiliki oleh masing-masing partai, kecuali Partai PKS. Tentu jangkauan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD pada masa reses tidak akan efektif dalam melakukan serap aspirasi dari masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, selain karena reses merupakan tugas anggota DPRD sebagai wakil rakyat, bukan sebagai mesin partai secara utuh, anggota DPRD dalam melakukan reses juga hanya akan terbatas pada konstituennya masing-masing. Sehingga serap aspirasi yang demikian tidak dapat mewakili aspirasi masyarakat secara luas.

Kemudian Untuk mengukur efektifitas dari sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di atas, maka dapat di lihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Abdul Hadi (Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)) kabupaten Sumenep, tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2015 di kabupaten Sumenep mengalami peningkatan. Berikut petikan hasil wawancaranya, “Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Dimana pada pilkada tahun 2015 tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 66,36%. Pada pilkada tahun 2010, partisipasi politik masyarakat lebih rendah, yaitu untuk putaran pertama mencapai 63,61%, dan untuk putaran kedua mencapai 54,56%.”¹⁶

Dilihat dari hasil wawancara di atas, persentase partisipasi politik masyarakat pada pilkada kabupaten Sumenep tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,75% jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2010 putaran I, dan mengalami peningkatan sebesar 11,70% jika dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2010 putaran II.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada tersebut tidak serta merta dapat di nilai sebagai keberhasilan dari sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, mengingat bahwa sosialisasi politik merupakan tugas penting penyelenggara pemilu.

¹⁶Abdul Hadi, Komisioner KPUD Sumenep, dalam wawancara tentang partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Sumenep tahun 2015 di kantor KPUD Sumenep, pada 15 Maret 2017, pukul 10.15 WIB. Ijin mengutip telah diberikan

Diketahui bahwa KPUD Sumenep sebagai penyelenggara pemilu telah melaksanakan fungsi tersebut secara masif. Hal ini dapat di lihat dalam petikan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis berikut.

“Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2015 dibandingkan dengan pilkada tahun 2010 ialah karena.”¹⁷

- 1) Di internal KPUD Sumenep melakukan sosialisasi yang masif, baik dari panitia pemilihan kecamatan, pps dan juga kpps. Selain itu KPUD Sumenep juga menggandeng masyarakat dan media massa, baik media cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pilkada.
- 2) Adanya keterlibatan pemerintah daerah, berupa dukungan penuh dalam penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pilkada.
- 3) Pemasifan pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan menggunakan jejaring yang ada, baik jejaring yang ada di KPUD Sumenep, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
- 4) Selain itu, sosialisasi penyelenggaraan pilkada dimasifkan, baik oleh partai politik, para calon kepala daerah, dan tim sukses serta simpatisan masing-masing calon kepala daerah.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa KPUD Sumenep telah melakukan tugas penting berupa sosialisasi penyelenggaraan pemilu dengan sebagaimana mestinya.. KPUD Sumenep melakukan sosialisasi secara masif yang dilakukan dengan mengandeng masyarakat, media cetak dan juga media elektronik. Sasaran dari sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPUD ini sudah jelas adalah masyarakat, begitu juga dengan materi sosialisasinya ialah menyadarkan masyarakat agar paham akan hak dan kewajibannya.

¹⁷*Ibid.*

Selain itu KPUD Sumenep juga menjelaskan mengenai faktor yang mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat pada pilkada Sumenep tahun 2015 tidak terlepas dari peran partai politik dan figur dari pasangan calon. Dimana KPUD menjelaskan bahwa setiap pasangan calon mempunyai tim sukses dan simpatisan. Tentu tidak semua orang akan dengan mudah mendapatkan dukungan secara cuma-cuma dari simpatisan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat 4 faktor yang akan membuat sosialisasi yang dilaksanakan KPUD akan efektif, berikut penulis kutipkan:

“Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektifitas sosialisasi KPU pada Pemilu Kada di Kabupaten Kampar, yakni berkaitan dengan ciri organisasi dalam menerapkan struktur organisasi dan teknologi dalam melaksanakan sosialisasi, sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian lingkungan masyarakat yang sejak awal di pantau dengan pendekatan terhadap tokoh masyarakat guna mensukseskan Pemilu Kada. Selain itu, sikap dan sarana pokok yang dibutuhkan oleh pekerja sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten Kampar dan juga penetapan kebijakan dan praktek manajemen sudah dijalankan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”¹⁸

¹⁸Reza Aulia Putra dan Muchid, “Efektifitas Sosialisasi Kpu Dalam Pemilukada”, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 67

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa sosialisasi KPUD akan efektif apabila dilakukan dengan sarana yang tepat, yaitu dengan melibatkan struktur dan teknologi, dengan pendekatan tokoh, dukungn pemerintah, dan kebijakan serta menejemen dilaksanakan sesuai aturan.

Berbicara tentang sarana teknologi dan pelibatan struktur, maka yang demikian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh KPUD kabupaten Sumenep. Dimana sosialisasi dilakukan secara masif, dengan melibatkan panitia pemilihan tingkat kecamatan sampai dengan tingkat dusun. Selain itu juga digandeng media cetak dan elektonik guna memasifkan sosialisasi tentang pilkada.

Yang tidak kalah pentingnya, dalam sosialisasi juga telah menggandeng para tokoh-tokoh masyarakat. sehingga jangkauan sosilisasi ini akan semakin luas. Selain itu juga dalam penyelenggaraan sosialisasi pilkada, KPUD Sumenep mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal itu termasuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh KPUD untuk melakukan sosialisasi. Empat faktor yang menjadikan sosialisasi yang dilakukan KPUD Kabupaten Kampar efektif, hal itu juga dilakukan oleh KPUD kabupaten Sumenep. Sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat pada pilkada kabupaten Sumenep tahun 2015 tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Sumenep.

Dari hasil pembahasan di atas, didapati 3 faktor utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD, sosialisasi yang dilakukan partai politik, dan, sosialisasi yang dilakukan figuritas.

Untuk melihat efektifitas sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPUD, penulis tidak terfokus dengan hasil penelitian terdahulu yang di kutip di atas, akan tetapi penulis akan menganalisis dari temuan/ dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Berdasarkan laporan maupun temuan di lapangan, pada Pilkada tahun 2015 di kabupaten Sumenep banyak didapati adanya dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwaslu Sumenep. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Zamrud Khan (Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)) kabupaten Sumenep.

“Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat beberapa dugaan pelanggaran pemilu, antara lain ialah.”¹⁹

- 1) Jadwal dan zona kampanye.
 - a) Laporan warga kecamatan Guluk-guluk dengan nomor laporan 29/PANWASLUCAM/GLK/IX/2015 tertanggal 14 Oktober 2015 tentang dugaan kampanye di luar jadwal kampanye yang dilakukan cabup dari pasangan calon nomor urut 1, yang bertempat di pondok pesantren al-Falah Pyd. Krg Sokon.
 - b) Laporan warga kecamatan Guluk-guluk tertanggal 1 Desember 2015 dengan nomor laporan 001/PANWASLUCAM/GLK2/XII/2015 tentang dugaan adanya kampanye di luar zona dan masa kampanye yang

¹⁹Zamrud Khan, Ketua Panwaslu Sumenep, dalam wawancara tentang pelanggaran pemilu pada Pilkada Sumenep tahun 2015 di kediaman Zamrud Khan Sumenep, pada 16 Maret 2017, pukul 16.15 WIB. Ijin mengutip telah diberikan

- di kemas dengan pengadaan lomba berkendara dengan baik, yang dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 1.
- c) Laporan dari warga kecamatan Gnding dengan nomor 01/LP/PANWASLUCAM/GDG/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 tentang dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Cabup dari pasangan nomor urut 1.
- 2) Politik uang
Temuan Panwaslu di kecamatan Arjasa dengan nomor temuan 56/TM/PANWASLUCAM/ARJ/XI/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 tentang dugaan politik uang.
 - 3) Keterlibatan perangkat desa
Temuan Panwaslu di kecamatan Ambunten dengan nomor temuan 1/TM/PANWASLUCAM/AMB/IX/2015 tertanggal 20 September 2015 tentang dugaan keterlibatan kepala desa Ambunten Temor dalam kampanye.
 - 4) Keterlibatan penyelenggara pemilu
 - a) Temuan Panwaslu di kecamatan Ambunten dengan nomor temuan 03/TM/PANWASLUCAM/AMB/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 tentang dugaan keterlibatan Staf kesekretariatan PPS desa Sogian dan staf kesekretariatan PPS desa Campor temor.
 - b) Temuan paslu di kecamatan Gayam dengan nomor temuan 01/TDK/PANWASLUCAM/GYM/SMP/2015 tertanggal 20 September 2015 tentang dugaan ketidak netralan ketua PPK kecamatan Gayam.
 - 5) Hilangnya alat peraga kampanye
Laporan PPK kecamatan Batu Putih dengan nomor laporan 001/LP/BTP/X/2015 tertanggal 17 Oktober 2015 tentang hilangnya Alat peraga kampanye.
 - 6) Kode Etik
Laporan warga desa Pamolokan Kecamatan Kota dengan nomor laporan 013/110/BR-JP/IX/2015 tertanggal 2 Desember 2015 tentang penyebaran tabloid “Mata Sumenep” diduga sebagai corong kampanye terselubung Cabup pasangan calon nomor urut 1.

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa laporan dugaan adanya pelanggaran yang masuk ke Panwaslu cukup banyak dan komplit. Dimana terdapat 3 laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan jadwal dan zona kampanye. Penetapan jadwal kampanye ini adalah

bagian yang harus menjadi materi muatan dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD, sehingga pasangan calon maupun relawannya tidak melakukan kampanye sebelum waktunya. Selain itu, adanya pelanggaran berkenaan dengan jadwal kampanye ini telah mengindikasikan tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan KPUD Sumenep, khususnya yang berkaitan dengan materi sosialisasi tentang jadwal pelaksanaan kampanye. Dugaan pelanggaran yang berkaitan tentang jadwal kampanye ini menjadi ironis karena dilakukan oleh pasangan calon yang sama.

Selain itu adanya temuan Panwas Kecamatan Arjasa mengenai dugaan adanya politik uang. Ada dua faktor kenapa pasangan calon menggunakan politik uang. Yang pertama ialah hilangnya rasa percaya diri yang menimbulkan perasaan bahwa di mata masyarakat dirinya tidak akan mampu untuk memberikan perubahan, sehingga dia tidak akan di pilih oleh masyarakat. Yang kedua ialah hilangnya kepercayaan pasangan calon kepada partai politik pengusungnya, dalam hal mencari dukungan yang sebanyak-banyaknya dari pada pemilih. Berangkat dari keadaan seperti ini, kemudian pasangan calon akan menempuh politik uang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan dukungan suara yang sebanyak-banyaknya.

Yang tidak kalah menariknya adalah dugaan terlibatnya kepala desa dalam proses kampanye. Sebenarnya kasus ini tidak beda jauh dengan kasus politik uang sebelumnya. Suatu tindakan yang sangat tidak

rasional, jika kepala desa melanggar larangan sebagai kepala desa hanya untuk mencari sensasi semata. Tentu dibalik tindakan tersebut, ada iming-iming yang menggiurkan.

Selain kasus dugaan terlibatnya kepala desa, ada juga kasus dugaan terlibatnya penyelenggara pemilu, seperti staf kesekretariatan PPS dan juga ketidak netralan PPK dalam penyelenggaraan pemilihan. Adanya keterlibatan dari penyelenggara pemilu harus di pandang sebagai oknom, hal ini karena KPUD kabupaten Sumenep telah melakukan sosialisasi dengan melibatkan segenap struktur yang ada. Yang terakhir adalah hilangnya alat peraga kampanye dan dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Selanjutnya mengenai dugaan pelanggaran kode etik. Dalam materi sosialisasi ada yang dikenal dengan istilah sosialisasi materi ketentuan kampanye. Sehingga hal ini seharusnya tidak terjadi, karena KPUD telah melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pilkada. Lebih parahnya lagi, pelanggaran pemilu yang terjadi di kabupaten Sumenep, setiap tahunnya meningkat. Sebagaimana yang disampaikan Panwaslu berikut:

“Dilihat dari jumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwaslu, maka pelanggaran pemilu meningkat. Akan tetapi tidak semua laporan tersebut dapat di proses atau di angkat ke muka hukum. Yang demikian itu karena setelah melalui proses pembahasan di GAKOMDU, banyak laporan yang tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, karena banyak yang tidak memenuhi

ketentuan untuk di angkat pada rana peradilan jika itu ada unsur pidananya.”²⁰

Berdasarkan paparan Panwaslu dari hasil wawancara tersebut, maka yang patut untuk dipertanyakan adalah tentang efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD, bahkan juga mengenai sejauh mana KPUD melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ditentukan tugas dari KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota, antara lain sebagai berikut: a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/ Walikota; b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/ kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/ Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan; d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/ Walikota dalam wilayah kerjanya; e) Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU/ KPU Provinsi; f) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota; g) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan

²⁰*Ibid.*

data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota terakhir, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

Selain pelanggaran di atas, didapati NIK ganda dan pemilih siluman yang berkeliaran. Hal ini dapat dilihat dari petikan hasil wawancara berikut, “Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwas disebabkan.”²¹

1) Amburadulnya daftar pemilih tetap, seperti pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih masuk dalam daftar pemilih tetap, adanya pemilih fiktif.

2) Adanya NIK ganda

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bagaimana pola kerja yang dilakukan oleh KPUD Sumenep. Pada hasil wawancara di atas terdapat indikasi bahwa KPUD Sumenep tidak melakukan pemutakhiran data sesuai dengan data kependudukan ataupun data pemilihan terakhir, sehingga mengindikasikan tidak adanya koordinasi yang baik yang dilakukan oleh KPUD dengan dinas kependudukan.

Selain itu, dalam proses rekrutmen pemilih, partai politik penguasa tidak hanya menjadikan figuritas sebagai sasaran dari sosialisasi politik dan juga rekrutmen pemilih, akan tetapi dimana figuritas dijadikan sebagai sarana dalam proses sosialisasi politik dan rekrutmen pemilih.

²¹*Ibid.*

Diketahui bahwa dalam melakukan sosialisasi politik, partai PAN melakukan strategi kemitraan. Dengan melakukan strategi kemitraan, hal ini berarti partai PAN menjadikan mitranya sebagai sarana dalam sosialisasi politik yang dilakukan. Kemudian dalam proses rekrutmen politik, partai PAN secara jelas menjual program-program dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh figur yang diusung untuk kebaikan kabupaten Sumenep kedepan.

Disini sudah terlihat bahwa partai PAN tidak hanya menjadikan figuritas sebagai menjadikan figuritas sebagai sasaran dalam sosialisasi politik maupun rekrutmen pemilih, akan tetapi menjadikan figuritas sebagai sarana dalam melaksanakan fungsi tersebut. Meski dalam rangka mendapatkan dukungan, partai PAN juga memberikan program-program padat karya kepada masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat bagaimana partai PKS memposisikan figuritas dalam melaksanakan sosialisasi politik maupun rekrutmen pemilih. Dalam sosialisasi politik maupun rekrutmen pemilih, partai PKS memang lebih terfokus dengan mesin partai yang dimiliki. Akan tetapi partai PKS juga melibatkan anggota DPRD yang dimilikinya dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen pemilih.

Hal yang sama juga dilakukan oleh partai PKB, selain menggerakkan mesin partai, dalam melaksanakan fungsinya untuk

medapatkan dukungan dari masyarakat guna memenangkan pasangan calon yang diusung, partai PKB juga melakukan kerjasama dengan para figur dan tim pemenangannya, serta simpatisannya. Sehingga sudah terlihat bahwa partai PKB tidak hanya menjadikan figuritas sebagai sasaran dalam melaksanakan fungsinya, melainkan juga menjadikan sarana dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam memposisikan figuritas, apa yang dilakukan partai PPP tidak jauh berbeda dengan ke tiga partai politik di atas. Partai PPP melakukan pendekatan tokoh, pendekatan santri dan pendekatan Kyai, dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki basis massa.

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa dalam menjalankan fungsinya, tidak ada satu pun partai politik pengusung yang benar-benar mengandalkan program, visi dan misi, serta kebijakan strategis yang dimiliki oleh partai politik. Hal ini selain sebagai bentuk akan kesadaran partai politik terhadap pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, juga sebagai bentuk pengakuan bahwa figuritas memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial politik masyarakat Madura. Timbulnya kesadaran tersebut tidaklah serta merta, melainkan sebagai bentuk akan pemahamannya partai politik terhadap tingkat pendidikan dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sumenep.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas, tidak semata-mata merupakan pelaksanaan ketentuan dalam perturan perundang-undangan saja, melainkan juga merupakan pelaksanaan dari misi, usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing partai politik. Tujuan dan usaha untuk mencapai tujuan dari Partai Amanat Nasional, yaitu terdapat dalam Pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional, tujuan dan fungsi Partai Keadilan Sejahtera yaitu terdapat dalam Pasal 7 dan 8 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, fungsi dari Partai Kebangkitan Bangsa yaitu terdapat dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa, dan tujuan dan usaha Partai Persatuan Pembangunan yaitu terdapat pada Pasal 5 dan 6 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan.

Dimana inti dari tujuan dan fungsi/ usaha ke empat partai ini ialah menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat, menegakkan keadilan, dan menciptakan kesejahteraan dalam kegidupan berbangsa dan bernegara, tanpa diskriminasi kerana perbezaan ras, suku, bahasa, dan budaya. Serta menjadi wadah aspirasi masyarakat dan menyadarkan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna ikut berpartisipasi politik secara aktif.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dan Figuritas Dalam Rekrutmen Pemilih

Bahwa untuk mengetahui bagaimana pengaruh partai politik pada penyelenggaraan pemilihan, maka dapat dilihat dari efektifitas partai politik dalam melaksanakan fungsinya, sehingga dengan itu kemudian dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Untuk mengetahui yang demikian itu penulis melakukan penyebaran kuisener di 19 desa, dari dua kecamatan yang ada di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep. Alasan penulis memilih Kepulauan Kangean sebagai tempat untuk menyebarkan kuisener adalah untuk mengetahui jangkauan dan masifnya pelaksanaan fungsi dari partai politik itu sendiri. Karena Kepulauan Kangean adalah bagian wilayah Kabupaten Sumenep yang dipisahkan oleh laut dengan jarak tempuh 9 jam perjalanan laut.

Berikut adalah hasil penyebaran 100 lembar kuesioner dengan pertanyaan seputar pengaruh partai politik dalam Pilkada Kabupaten Sumenep pada tahun 2015.

- a. Berdasarkan pertanyaan tentang “dasar penggunaan hak pilih”, 73% karena sadar akan hak dan kewajiban, 14% ikut-ikutan teman, 9% terpaksa, dan 4% tidak enak sama Kyai. Hal sebagai tanda bahwa partisipasi politik sebagian besar masyarakat Sumenep yang menggunakan hak pilihnya karena pengaruh dari pendidikan politik yang mereka dapatkan. Dan harus diakui, bahwa 28% yang tersisa,

ada pada pengaruh figuritas dalam menggunakan haknya. Figuritas yang dimaksudkan disini ialah tokoh Agama, tokoh masyarakat, ketua lembaga kemasyarakatan yang memiliki basis massa, dan keluarga, serta teman. Yang rentan terpengaruh terhadap figuritas dalam menggunakan hak pilihnya adalah pemilih pemulah dan masyarakat yang berpendidikan rendah.

- b. Berdasarkan pertanyaan mengenai “pernah atau tidaknya mendapat pendidikan politik”, 62% iya, 29% kadang-kadang, dan 9% sering. Dengan demikian ini berarti bahwa 100% para pemilih telah mendapatkan pendidikan politik, baik itu disadari atau pun tidak disadari. Akan tetapi disini yang menjadi perbedaan dari ke tiga jawaban tersebut tentang seberapa sering mereka mendapatkan pendidikan politik itu.
- c. Berdasarkan pertanyaan mengenai “dari mana mendapat pendidikan politik”, 27% dari partai politik, 40% dari televisi, 8% dari sekolah, dan 25% dari radio. Disini sudah terlihat jelas bagaimana jangkauan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik. Sebagian besar masyarakat mendapatkan pendidikan politik dari media elektronik. Dan ini berarti bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik tidak masif dan menyeluruh. Diketahui bahwa seringkali pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik merupakan ajang sosialisasi dan penanaman pengaruh oleh

partai politik terhadap masyarakat. Akan tetapi ketika jangkauan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak masif, tentu partai politik tidak bisa menanamkan pengaruh pada masyarakat secara masif.

- d. Berdasarkan pertanyaan mengenai “dasar memilih salah satu pasangan calon”, 47% karena figuritas, 21% karena partai politik pengusung, 30% ikut-ikutan, dan 2% hubungan kekeluargaan. Dari persentase tersebut, sudah jelas bahwa figur itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemenangan pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Sumenep tahun 2015. Sedangkan partai politik yang hanya memperoleh 21% , merupakan bukti nyata bahwa kepercayaan masyarakat kepada partai politik telah pudar. Hal ini bersesuaian dengan yang disampaikan ibu Dian Novita bahwa “masyarakat Madura itu sendiri sudah cerdas, tidak kemudian penentuan pilihan oleh masyarakat harus karena partai. Pengaruh partai dengan figuritas itu sama, yaitu figur yang diangkat punya pengaruh di masyarakat, dan kemudian di dukung oleh partai politik.”²² Berdasarkan hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa bahwa dengan semakin cerdasnya masyarakat, maka pengaruh partai politik hanya sebatas sebagai tunggangan para figur menuju pemilihan.

²²Dian Novita, *op. cit.*

Persentase pada pertanyaan ini menunjukkan besarnya pengaruh figuritas. Dimana secara keseluruhan, pengaruh figuritas mencapai 79%. Karena menurut pendapat penulis, ikut-ikutan ini adalah bagian dari pengaruh figuritas, kembali ke pembahasan sebelumnya, bahwa figuritas yang dimaksudkan disini ialah bisa berupa teman, tokoh Agama, tokoh masyarakat, ketua lembaga kemasyarakatan yang memiliki basis massa, dan keluarga. Suatu contoh, misalkan saya punya teman/ keluarga yang kuliah ambil jurusan hukum, kemudian ketika saya kuliah, saya pun mengambil jurusan hukum, karena ingin seperti teman/ keluarga saya yang ambil jurusan hukum terlebih dahulu.

- e. Selanjutnya ialah pertanyaan tentang “dasar memilih salah satu pasangan calon karena partai politik pendukung”, 14% karena sebagai pengurus partai politik, 49% karena hubungan kekeluargaan dengan pengurus partai politik, 11% karena program partai politik, dan 26% karena ikut-ikutan. Berdasarkan hasil dari pertanyaan mengenai alasan memilih pasangan calon karena partai politik pengusung, 74% karena adanya hubungan dengan partai politik, baik sebagai pengurus ataupun hubungan kekeluargaan dengan para pengurus partai politik. Sedangkan 26% sisanya merupakan hasil dari pengaruh rekrutmen pemilih yang dilakukan oleh partai politik.

Hal ini menunjukkan betapa sempitnya jangkauan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik, serta rekrutmen pemilih yang dilakukan oleh partai politik. Dimana fungsi ini hanya menjangkau para pemilih yang memiliki hubungan dengan pengurus/ partai politik itu sendiri. Hasil persentasi kusioner di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada partai politik, sehingga partai politik tidak memiliki kekuatan untuk melakukan rekrutmen pemilih. Hasil Persentase pengaruh partai politik pada pertanyaan ini semakin menguatkan hasil pertanyaan sebelumnya, dimana persentasi yang menunjukkan hasil pengaruh partai politik persentasinya sangat kecil.

- f. Yang terakhir adalah pertanyaan tentang “dasar memilih pasangan calon karena figuritas”, 2% karena hubungan kekeluargaan, 58% karena visi misi pasangan calon, 17% karena tim pemengan pasangan calon, dan 23% karena tokoh Agama. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat memilih pasangan calon karena figuritas disebabkan visi misi yang diusung oleh pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumenep memang sudah cerdas dalam hal memilih. Dimana mereka sudah bisa menilai mana pasangan yang baik dan akan peduli pada rakyat, sehingga harus didukung dengan sepenuh hati. Dan penilaian itu semua dilakukan dengan melihat visi misi dan keilmuan yang

dimiliki oleh pasangan calon. Selain itu, bagi masyarakat yang tahu banyak tentang kehidupan pasangan calon sebelumnya, maka penilaian ini akan didasarkan tidak serta merta kepada visi misi, melainkan mungkin tidak visi misi itu bisa diwujudkan oleh pasangan calon. Hal ini pun senada dengan yang disampaikan ibu Dian Novita, dimana beliau menuturkan bahwa:

“Masyarakat sudah mulai pandai untuk kemudian memilah dan memilih mana yang menurut penilain mereka yang layak untuk dipertahankan atau yang layak untuk menjadi pemimpin berikutnya. Antara partai politik dengan figuritas memiliki pengaruh sama besar, mengingat di Madura pengaruh figur itu sangat besar, apa lagi dengan embel-embel Kyai, itulah kenyataannya. Akan tetapi pengaruh partai politik juga tidak boleh di kesampingkan, karena partai adalah kendaraan setiap pasangan calon.”²³

Dari petikan wawancara di atas sudah jelas bahwa pengaruh figuritas di Kepulauan Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep sangat kuat. Dapat dilihat juga bahwa yang menjadi faktor kuatnya figuritas dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adalah gelar-gelar keagamaan yang menempel pada figur tersebut. Yang tak kalah penting juga adalah keilmuan dan kemampuan dari seorang figur untuk memberikan perubahan menurut pandangan para pemilih, dan biasanya untuk mengetahui suatu pasangan apakah akan mampu memberikan perubahan atau tidak, para pemilih akan menilai

²³*Ibid.*

dari visi misi yang diusung, dan rekan jejak sehari-hari dari pasangan calon.

Bahkan menurut ibu Dian Novita, bukah hal yang tidak mungkin suatu saat figur yang bagus, yang memiliki kapabilitas, yang hendak bersaing dalam pemilihan akan maju secara perseorangan. Menurut beliau hal ini “penilaian masyarakat di berikan kepada individu atau kepada figuritas. Hal ini juga di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang tidak mengharuskan menggunakan partai politik.”²⁴.

Diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pasangan calon untuk maju ke pilkada tidak harus terikat dengan usulan partai politik. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2016 tentang perubahan ke dua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati/ Walikota dan wakil Walikota, bahwa peserta pemilihan adalah 1) pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. 2) perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

²⁴*Ibid.*

Jika dari tadi dikatakan bahwa masyarakat Madura sudah cerdas, maka yang menjadi pertanyaan mendalam adalah apa yang menyebabkan cerdasnya masyarakat Madura, khususnya dalam penentuan pilihan dalam Pilkada? Maka jawabannya adalah banyak faktor, di antaranya tingkat pendidikan, dan bisa juga pengalaman. Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber berikut:

“Cerdasnya masyarakat dalam memilih dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya ialah tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Jika dulu masyarakat masih banyak yang buta huruf dan tingkat pendidikannya cukup rendah, akan tetapi sekarang tingkat pendidikan masyarakat pedesaan-pedesaan telah mampu menempuh pendidikan hingga level strata. Selain itu cerdasnya masyarakat disebabkan oleh pengalaman. Dari pengalaman kemudian masyarakat dapat memberi penilaian kepada pasangan petahana atau pasangan baru.”²⁵

Pada petikan wawancara itu sudah jelas, bahwa cerdasnya masyarakat dalam menentukan pilihan karena faktor pendidikan, dan itu sudah pasti. Selain itu, adalah berangkat dari pengalaman, yaitu ketika pasangan petahana pada pemerintahan sebelumnya sudah memberikan perubahan yang itu dapat dirasakan oleh masyarakat, maka masyarakat mempertahankan petahana.

²⁵*Ibid.*

Akan tetapi jika sebelumnya petanaha tidak bisa memberikan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bahkan mungkin masyarakat menganggap pemerintahan pada masa itu tidak jelas arahnya kemana, maka tentu yang akan diuntungkan adalah pasangan pendatang. Tentu dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi melihat partai politik yang mana yang menjadi pengusungnya. Dan kasus inilah yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sumenep pada tahun 2015. Dimana yang memenangkan Pilkada adalah pasangan petanaha.

Berdasarkan pembahasan hasil kuisener di atas, menunjukkan bahwa dasar dari digunakannya hak pilih masyarakat adalah didominasi oleh pengaruh figuritas. Akan tetapi pemilihan figuritas yang dilakukan oleh partai politik, baik figur yang diusung dalam pilkada, maupun figur yang hanya untuk melaksanakan fungsi dari pada partai politik adalah bagian dari strategi partai politik untuk dalam menanamkan pengaruhnya di tengah masyarakat kabupaten Sumenep.

3. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan hasil analisis yang dilakukan penulis di atas, penulis kutipkan hasil penelitian terdahulu yang.

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Syarif di Kabupaten Pamekasan, dengan judul “Pergeseran Politik Kyai dan Santri di Pamekasan Madura”.

Dengan dimenangkannya pilkada kabupaten Pamekasan pada periode 2013-2018 oleh figur yang berasal dari masyarakat biasa atau bukan dari trah Kyai, seakan terbentahkan realitas kepemimpinan daerah yang mayoritas di pimpin oleh Kyai atau trah Kyai. Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Januari 2013 ini merupakan semacam momentum pudarnya kharisma Kyai yang selama ini dikenal mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Madura. Pola politik Kyai-santri dimadura ialah:

Pertama, formula politik kyai di Madura yang digunakan tetap mempertahankan pada dua tumpu kekuatan, yaitu *tradisional domination* dan *bharismatic domination*. Dalam hal ini kyai mempertegas perannya dalam hubungan harmonisasi antara santri-kyai merupakan wahana transformasi pesan-pesan moral yang dijustifikasi oleh nilai-nilai Agama, seperti barokah dan tawadu’ dan simbol-simbol moral lainnya. Itulah upaya kyai dalam mempertahankan otoritas terhadap santri-santrinya.

Kedua, kiprah politik di Madura adalah perjuangan yang mengandung nilai-nilai Agama. Mereka berpandangan bahwa politik bagian tak terpisahkan dari Agama, dan sekalipun diantara mereka mempunyai pandangan bahwa politik adalah urusan dunia, tetapi karena politik dijalankan oleh orang islam dan bertujuan untuk pelestarian Agama dan kemaslahatan masyarakat, maka politik berupaya menjalankan tujuan dari Agama itu sendiri.

Ketiga, sikap politik santri sangat dipengaruhi oleh sikap tawadu’ (kepatuhan) ciri dari jati seorang santri yang serta merta mengikutu dan meneladanai apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh seorang kyai. Pengalaman sosial-keagamaan yang dirasakan seorang santri di pesantren menempatkan kyai sebagai panutan yang tidak tergantikan. Di lain pihak, kyai juga dipercaya dapat mendatangkkn basto dan tola (kesengsaraan hidup) apabila santri berani melanggar kepatuhan (tawadu’) terhadap kyai. Perilaku politik santri ini penulis katagorikan sebagai santri patuh mutlak.²⁶

²⁶Zainuddin Syarif, “Pergeseran Politik Kyai dan Santri di Pamekasan Madura”, Al-Tahrir, Vol 16, No 2, November 2016:293-311, hlm. 309

- b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Achmad Madani di Kabupaten Pamekasan, dengan judul “Dinamika Kekuasaan Kyai (Indikasi Pudarnya Dominasi Politik Kyai Dalam Proses Demokratisasi Lokal)”.

Peran dan kuasa Kyai sepuh yang mencakup semua ranah kehidupan menjadikannya sebagai tokoh hegemonik dan dominatif yang mempunyai peran dan fungsi signifikan dalam melakukan kontrol terhadap gerak-gerik dan tingkah laku masyarakat. Habitus dan doxa masyarakat Pamekasan terhadap keberadaan Kyai sepuh dalam rana politik tersebut terbukti dalam beberapa kali Pilkada, dukungan Kyai sepuh selalu memperoleh Suara mayoritas dan selalu unggul dan memenangkan pemilihan. Dengan mengandalkan ketokohan, kuasa dan legitimasi yang disebabkan habitus dan doxa dapat membius, serta mempengaruhi politik dan perilaku politik masyarakat Pamekasan.

Dalam rana politik beliau juga mampu menciptakan kondisi atas legitimasi yang disandang dapat membentuk sebuah doxa dimana ia punya wewenang dalam menentukan pilihan politik masyarakat, serta menjadi penentu kebijakan politik. Ia mampu masuk dan bermain ke ranah politik, baik menjadi vote getter, political player, maupun political man. Preferensi Kyai sepuh adalah preferensi masyarakat, begitu juga dalam rana politik keberadaan Kyai sepuh terbukti membentuk sebuah habitus dan doxa dalam diri masyarakat yang menganggap Kyai sepuh sebagai sumber fatwa ketika masyarakat memiliki pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Kyai sepuh menjadi tempat referensi tentang pilihan politik yang tepat, serta yang dapat berpengaruh menjadi kemaslahatan bagi Agama dan umat.

Pertarungan antara Kyai sepuh melawan kompetitornya dalam pilkada, baik melalui wacana budaya, politik, dan agama mampu menggeser dominasi kekuasaan politik yang dibangunnya. Pilkada kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 adalah sejarah dikalahkannya calon yang di dukung oleh Kyai

sepuh dengan wacana-wacana yang di bangun oleh masyarakat sebagai kompetitor guna menggeser dominasi politik Kyai²⁷

Berdasarkan hasil dari kedua peneliatian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa tokoh Agama, yaitu Kyai memiliki pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Madura. Akan tetapi dengan dimenangkan pilkada kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 oleh calon dari kalangan masyarakat biasa atau bukan Kyai atau pun trah Kyai, merupakan bentuk bergesernya kepatuhan mutlak terhadap perilaku sosial politik Kyai telah memudar. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku sosial politik Kyai tidak lagi menjadi referensi yang utuh dalam perilaku sosial politik masyarakat Madura.

Korelasi hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di kabupaten Pamekasan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kabupaten Sumenep ialah sama-sama dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan politik yang memiliki dominasi yang luar biasa dalam pelaksanaan pilkada di Kepulauan Madura. Dan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa partai politik telah melaksanakan fungsinya secara maksimal, dan menggeser kekuatan politik ketokohan.

²⁷Abdullah Achmad Madani, 2016, "*Dinamika Kekuasaan Kyai (Indikasi Pudarnya Kekuasaan Politik Kyai Dalam Proses Demokratisasi Lokal)*",(Tesis Pascasarjana, Fkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada).